

HUKUM

L9B/90
23(3)

LAPORAN PENELITIAN
Kontrak No: 002/PP-UA/SPP/10/89

KOLEKSI KHUSUS
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

0784

**REALISASI KERJASAMA A.S.E.A.N-INDONESIA
TERHADAP EKSPOR NON MIGAS (PARIWISATA)
DI SUMATERA BARAT**

OLEH
M. JHON, SH



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
Padang
1990

BAB. I.

P E N D A H U L U A N.

A. Latar Belakang Masalah.

Bahwa kalau kita perhatikan perkembangan kerjasama dari organisasi regional ASEAN sejak berdirinya pada tanggal 8 Agustus 1967, yang perkembangannya tampak lebih berarti setapak demi setapak, namun sejak KTT ASEAN di Bali dapat - lah dilihat adanya langkah lebih maju yaitu berupa usaha- usaha intensif terutama dibidang perekonomian.

Asia tenggara adalah suatu kawasan yang kaya sumber ke-ayaan alam yang memiliki sumber potensi ekonomi yang luar biasa, tetapi kenyataannya sebahagian besar penduduknya ada lah miskin, maka dari itu organisasi regional ASEAN ini di- juluki juga dengan organisasi regional dari negara-negara yang sedang berkembang. Pembangunan ekonomi yang dilakukan sejauh ini dapat dikatakan berhasil dari pertumbuhan penda-apatan nasional.

Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pada umumnya negara negara yang sedang berkembang ini dalam pemerataan pendapat an pembangunan terjadi kepincangan-kepincangan secara konk-ritnya terjadi kepincangan pendistribusian perekonomian. Bi-asanya kegiatan perekonomian tersebut hanya pertumpu pada kota-kota besar saja, hal ini barang kali juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti sarana dan prasana kegiatan perekonomian tersebut hanya terdapat dikota-kota seperti tersedianya pabrik dan perusahaan-perusahaan.

Tetapi kalau kita lihat sektor lain yang ada dalam ke-giatan perekonomian itu, maka terdapat sektor yang bisa di- lakukan di daerah, yaitu pembukaan daerah pariwisata. Yang pada umumnya di daerah ini daerah pariwisata ini lebih ber- sifat alami yang akan mendatangkan kepuasan tersendiri bagi para konsumennya.

Dari itulah kiranya pemerintahan negara Republik Indo-nesia didalam GBHN selalu menetapkan didalam bidang ekonomi

ini, yaitu tentang sektor pariwisata, antara lain didalam GBHN disebutkan : Pembanguna pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa, serta memperkenalkan alam dan kebudayaan Indonesia. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional serta kelestarian lingkungan hidup.

Bahwa kalau kita perhatikan daerah Sumatera Barat adalah merupakan daerah pertanian yang hanya ada terdapat sumber kekayaan alam non migas sebagai komoditi ekspor, disamping itu Sumatera Barat juga kaya akan sumber ekspor non migas pariwisata.

Maka dari itu daerah Sumatera Barat perlu memperluas "economic base" dari pertanian kepada non pertanian dalam rangka meningkatkan ekspor non migas ke berbagai negara tujuan, disamping menyediakan kesempatan kerja disamping peningkatan kesempatan kerja, yang belum banyak diketahui.

Keterbatasan tersedianya sumber daya alam untuk produksi pertanian tidak dapat mendukung laju pertumbuhan penduduk. Nampaknya, sub sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat memberikan lapangan kerja untuk menampung pertambahan angkatan kerja dan pendapatan di Sumatera Barat yang secara nasional merupakan export non migas untuk manca negara. .

B. Tujuan Penelitian.

Penelitian yang dilakukan ini adalah mendapatkan data tentang pelaksanaan kerjasama regional ASEAN dengan negara Indonesia, tetapi lebih dikhususkan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang kegiatan pariwisata secara nasional pada umumnya dan Sumatera Barat pada khususnya yang ingin dicapai pada masa waktu yang akan datang.
2. Untuk mengetahui gambaran tentang keberhasilan sektor

BAB. III.

HASIL DAN PEMBAHASAN.A. Persetujuan Yang Dihasilkan Organisasi Regional ASEAN Dalam Kepariwisata.

Satu tahun setelah terbentuknya Organisasi Regional ASEAN, maka Menteri-Menteri Luar Negerinya pada bulan Agustus tahun 1968 di Jakarta dan pada bulan Desember tahun 1969 di Kuala Lumpur masing pada sidang Menteri Luar Negeri ASEAN yang kedua dan ketiga, dimana kedua sidang itu telah berhasil disepakati kerjasama ekonomi yang meliputi hal-hal sebagai berikut¹:

- a. Perdagangan dan industri.
- b. Kepariwisata.
- c. Keuangan.
- d. Produksi bahan makanan dan Suply, termasuk perikanan.
- e. Pelajaran.
- f. Communication / air traffic services / meteorology.
- g. Pengangkutan dan telekomunikasi.
- h. Penerbangan sipil.

Didalam kerjasama ekonomi yang telah disepakati oleh Menteri Luar Negeri ASEAN, salah satu yang menjadi bidangnya adalah tentang pariwisata. Terhadap bidang Pariwisata ini, maka ASEAN pun telah pula mengambil langkah-langkah sebagai berikut²:

1. Terhadap Simplification of entry-visa procedures, langkah yang diambil adalah :
 - Pemberian izin kunjungan tujuh hari tanpa visa bagi negara anggota.
 - Mengakui dokument-dokument perjalanan kolektif bagi para peserta package tours.

1. Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri, 1945-1970, Panitia Penulisan Sejarah DEPLU, 1971, hal.....333.

2. Ibid, hal.....334.

BAB. IV.
P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian-uraian dari bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sektor pariwisata bagi daerah Sumatera Barat merupakan alternatif yang potensial dalam membangun perekonomian daerah Sumatera Barat, karena sektor pertanian dan sektor industri dikerunia oleh objek wisata alam (tourism natural resource endowment) dan potensi objek wisata sosial budaya (cultural heritage) yang unik. Tetapi pada kurun waktu 1981 - 1985 dalam pembentukan pendapatan daerah yang diukur dengan PDBR masih rendah jika dibandingkan dengan rata Indonesia (Jakarta, Bali, Sumatera Utara).
2. Upaya peningkatan kunjungan wisatawan asing di Sumatera Barat maka telah diupayakan kebijaksanaan dan strategi kepariwisataan.
3. Pembangunan kepariwisataan di Sumatera Barat semakin menunjukkan trend perkembangan, tetapi belum mampu menoreboos fasilitas yang telah ada pada organisasi regional ASEAN yang telah disepakati oleh negara anggota ASEAN. Walaupun demikian pemerintah Sumatera Barat telah berusaha mengadakan promosi wisata keberbagai negara, yang diharapkan nantinya negara-negara ini sebagai pembeli dari ekspor non migas (pariwisata) Sumatera Barat.

B. Saran-Saran.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Sumatera Barat dalam bersaing dengan daerah tujuan wisata lainnya, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengembangkan produk wisata yang mampu bersaing dengan daerah tujuan wisata lainnya.
2. Meningkatkan program sadar wisata bagi setiap golongan

dan lapisan masyarakat.

3. Agar bisa memanfaatkan organisasi regional ASEAN sebagai wadah kerjasama antar negara dengan melalui pemerintah pusat, maka hendaknya diupayakan terobosan-terobosan untuk bisa memberikan fasilitas-fasilitas bantuan teknis dan keuangan pembangunan ekspor non migas pariwisata Sumatera Barat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

1. Ali Moertopo, Strategi Pembangunan Nasional, Yayasan Proklamasi CSIS, Jakarta, 1982.
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri Deplu, ASEAN Dan Perkembangannya, 1976.
3. Panitia Penulisan Sejarah Deplu, Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri 1945 - 1970, Yayasan Kesejahteraan Karyawan Deplu, 1971.
4. Bappeda Tk.I. Sumatera Barat, Sumatera Barat Dalam Angka 1985,
5. -----, Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat 1984/85 - 1988/89, Buku I.
6. -----, Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat 1984/85 - 1988/89, Buku II B.
7. -----, Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat 1984/85 - 1988/89, Buku III.
8. Sekretariat Nasional ASEAN Deplu R.I, ASEAN Selayang Pandang, 1984.
9. -----, Daswarsa ASEAN 1967 - 1977
10. Majalah Analisa, Tahun V, No.2.
11. -----, Tahun VI, No. 2.
12. -----, Tahun 1987, No.9.